



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NGOLU SIMANJUNTAK
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PROTOKOL DAN PENGAMANAN OBJEK VITAL
3. NHK : 220877

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.540.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 540.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 129 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	66.950.000
1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 64.500.000		
2. MOTOR, HONDA CB 150 R SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.450.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.300.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	23.612.338
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.631.862.338
III. HUTANG	Rp.	1.068.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	563.862.338

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.